

**KEABSAHAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU  
DARI SEGI HISTORIS MASUKNYA PROVINSI PAPUA KE DALAM  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
(NKRI)**

Oleh

Hotmaida Solavide Magdalena Hutahaeon<sup>1</sup> dan Ninik Darmini<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui keabsahan kontrak PT. Freeport ditinjau dari segi historis masuknya Provinsi Papua kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagaimana kekuatan mengikatnya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan dan kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontrak Karya yang dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia ditinjau dari segi historis masuknya Provinsi Papua kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah perjanjian yang sah dan mengikat diantara para pihak. Dan bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2021 tidak lagi berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Kata Kunci : Kontrak Karya, Sejarah Papua, PT. Freeport Indonesia

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

## **THE VALIDITY OF CONTRACT OF WORK PT.FREEPORT INDONESIA REVIEWED FROM THE HISTORICAL ASPECT OF THE ENTRY OF PAPUA PROVINCE INTO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

By

HotmaidaSolavide Magdalena Hutahaeen<sup>3</sup> andNinikDarmini<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

The aim of this research is to find out the validity of contract of PT. Freeport based on the history of Papua province joining Republic of Indonesia and its legal power after Government Regulation Number 1 of 2017.

This research is analytical descriptive research. Type of research is normative research with literary review that is conducted by collecting all necessary materials which is then analyzed systematically.

The result of this research shows that Work Contract made and executed between Indonesia Government and PT. Freeport Indonesia based on the historical point of view of Papua province joining Republic of Indonesia is a legal agreement and binds all parties.

The implementation of Government Regulation Number 1 of 2017 concerning on Fourth Amendment of Regulation of Government Regulation Number 23 of 2010 concerning on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which is a regulation of Indonesia Constitution Number 4 of 2009 concerning on Mineral and Coal, Work Contract of PT. Freeport Indonesia will end in 2021 and is no longer binding as constitution for all parties.

*Keywords: Contract of Work, History of Papua, PT. Freeport Indonesia*

---

<sup>3</sup> Students of Master Program of Law Studies of Faculty of Law of GadjahMada University, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer of Civil Law of Faculty of Law of GadjahMada University, Yogyakarta